

***COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM SEKOLAH
PEREMPUAN CAPAI IMPIAN DAN CITA-CITA (SEKOPER CINTA) DI
KELURAHAN MUSTIKASARI KOTA BEKASI***

Aisyah Rifdah Rellya, Amni Zarkasyi Rahman,

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman : www.fisip.undip.ac.id Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita program is an initiative of the West Java Provincial Government that aims to increase women's capacity in various aspects, including economy, health, and education. This study aims to determine the extent to which the principles of Collaborative Governance are applied by using Ansell dan Gash's indicators, namely initial conditions, institutional design, leadership and collaborative processes. As well as describing the things that become drivers and inhibitors by using the 5M theory in the context of management. The research method used is a qualitative-descriptive approach, with data collection techniques through observation and interviews. The results show that the Sekoper Cinta program ini Mustikasari Village has reflected several elements of Collaborative Governance, such as multi-stakeholder involvement, good communication between actors, common understanding, and shared commitment. The Sekoper Cinta program has had a positive impact on participants, especially in terms of increased awareness of women's rights, entrepreneurial skills, and access to health and education information. However, there are still challenges in the implementation of the Sekoper Cinta program, such as limited resources, the lack of involvement of the private sector, and program sustainability after the program is over.

Keywords: *Sekoper Cinta, Women Empowerment, Collaborative Governance, 5M, Management.*

ABSTRAK

Program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip *Collaborative Governance* diterapkan dengan menggunakan indikator milik Ansell dan Gash yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaboratif. Serta mendeskripsikan hal-hal yang menjadi pendorong dan penghambat dengan menggunakan teori 5M dalam konteks manajemen. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Sekoper Cinta di Kelurahan Mustikasari telah mencerminkan beberapa elemen *Collaborative Governance*, seperti keterlibatan multi-stakeholder, komunikasi yang baik antar aktor, pemahaman yang sama, serta komitmen bersama. Program Sekoper Cinta ini memberikan dampak positif bagi peserta, terutama dalam peningkatan kesadaran akan hak-hak perempuan, keterampilan wirausaha, serta akses terhadap informasi kesehatan dan pendidikan. Namun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan program Sekoper Cinta, seperti keterbatasan sumber daya, belum terlibatnya sektor swasta, dan kesinambungan program setelah program selesai.

Kata Kunci: *Sekoper Cinta, Pemberdayaan Perempuan, Collaborative Governance, 5M, Manajemen.*

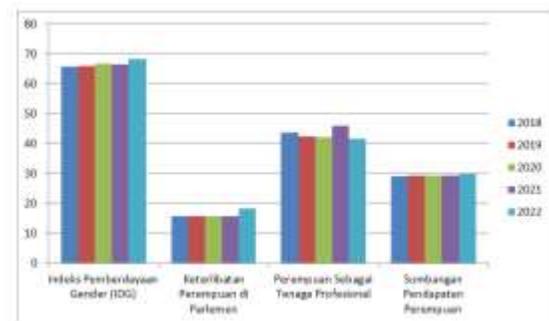
Pendahuluan

Perempuan merupakan unsur penting dalam kehidupan masyarakat terutama dalam pembangunan di Indonesia, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, dan sosial. Kondisi perempuan perlu mendapat perhatian penuh dari pemerintah Indonesia. Sayangnya di Indonesia, para perempuan dihadapkan dengan berbagai permasalahan Bias gender tentu saja akan menjadi kendala dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan gender, yang ditunjukkan dengan tidak adanya ketimpangan gender, dan dengan sehingga mereka dapat mengakses peluang untuk berkontribusi, dan kontrol atas pembangunan serta meraih manfaat yang setara dan adil dari pembangunan (Rahayu, 2022).

Pada dasarnya, perempuan memiliki peran dalam pembangunan nasional. Perempuan bukan hanya bertugas untuk memajukan dirinya sendiri dan keluarganya saja, tetapi juga memiliki peran dalam pembangunan negara terutama dalam sektor perekonomian. Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2021, sebanyak 64,5 persen dari total Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dikelola oleh perempuan. Maka, perempuan

diharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian dengan keterlibatannya. Peningkatan keikutsertaan dan peran perempuan dalam proses pembangunan negara juga termasuk kedalam salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* ke-5 yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Dalam mencapai kesetaraan gender salah satu usaha yang memungkinkan untuk dilakukan yakni melalui pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di kalangan perempuan.

Kota Bekasi merupakan salah satu kota di provinsi Jawa Barat yang memiliki program pemberdayaan perempuan. Berikut merupakan data In Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bekasi Tahun 2018-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2023

Merujuk pada data tersebut, indeks pemberdayaan gender di Kota Bekasi bergerak naik turun. Kondisi itu

mengindikasikan bahwa pemberdayaan masyarakat bagi kaum perempuan yang diimplementasikan oleh pemerintahan setempat masih kesulitan dilaksanakan dengan optimal dan berkelanjutan. Maka perlu dioptimalkan kembali dan diperkuat dengan berbagai jenis agenda yang diimplementasikan melalui pemberdayaan perempuan.

Kelurahan Mustikasari merupakan salah satu Kelurahan yang ditunjuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi untuk melaksanakan program pemberdayaan perempuan. Berikut merupakan data kemiskinan Kelurahan Mustikasari:

Data Kemiskinan Kelurahan Mustikasari		
2021	2022	2023
814	814	1.396

Sumber :
Kelurahan Mustikasari, 2024

Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan jumlah penduduk miskin di

Kelurahan Mustikasari, yang membutuhkan perhatian dan upaya penanganan lebih lanjut untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut. Berdasarkan keadaan tersebut, diperlukannya program pemberdayaan perempuan.

Salah satu program pemberdayaan yang telah dijalankan di wilayah Jawa Barat adalah program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita atau biasa dikenal dengan Sekoper Cinta. Program ini merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan perempuan yang diluncurkan pada tahun 2018.

Dalam pelaksanaannya, program ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, sektor swasta, komunitas lokal, serta universitas. Oleh karena itu, pendekatan *Collaborative Governance* menjadi relevan dalam memastikan program ini berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Namun, implementasi *Collaborative Governance* dalam Sekoper Cinta tidaklah mudah karena menghadapi beberapa tantangan, salah satunya kurangnya keterlibatan efektif dari berbagai aktor. Selain itu, rendahnya partisipasi perempuan dalam program, dimana masih banyak peserta yang tidak

mendapatkan akses dan informasi mengenai program ini. Hal ini dapat terjadi karena di beberapa wilayah mengalami kendala akses informasi dan partisipasi, terutama di daerah dengan infrastruktur komunikasi yang kurang memadai. Lalu terdapat kendala pada saat pemasaran dimana terkadang produk yang sudah jadi tersebut tidak jelas pemasarannya karena tidak ada wadah yang menangani urusan tersebut.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, factual, dan akurat. Metode penelitian ini disusun untuk mengumpulkan data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan mengenai *Collaborative Governance* diterapkan dalam program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta) di Kota Bekasi. Adapun lokus tempat dan wilayah dalam pelaksanaan penelitian ini adalah Kelurahan Mustikasari di Kota Bekasi. Kemudian untuk fokus penelitian ini adalah *Collaborative Governance* diterapkan dalam program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta) di Kota Bekasi. Informan dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*. Selain itu, pemilihan informan juga mempertimbangkan aspek

keterkaitan informan dengan topik dan program yang penulis ambil. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih relevan dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk pengumpulan data menggunakan jenis data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data triangulasi. Selain itu, untuk menganalisis dan melakukan interpretasi data dengan tiga tahap yaitu Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Pembahasan

Penelitian ini pada dasarnya melakukan analisis bagaimana *collaborative governance* diterapkan dalam program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta) di Kota Bekasi khususnya di lokasi binaan Kelurahan Mustikasari. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka serta informasi yang didapatkan melalui informan. Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk kalimat serta pernyataan informasi yang disampaikan oleh para informan pada sesi wawancara. Dari hasil wawancara tersebut Peneliti tuangkan ke dalam bentuk penelitian kualitatif yang akan menggambarkan fenomena yang ditemukan di lapangan.

Collaborative Governance dalam Program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta) di Kelurahan Mustikasari

Program Sekoper Cinta merupakan salah satu bentuk upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perempuan.

a. Kondisi Awal

Kondisi awal menjadi titik mula terjadinya pengaruh proses kolaborasi yang mendorong para stakeholder memiliki target yang sama guna memecahkan permasalahan yang ingin dipecahkan. Pengaruh dari masih adanya perempuan-perempuan yang belum mumpuni di berbagai bidang. Dimana dengan tidak berdayanya seorang perempuan dapat melahirkan banyak permasalahan sosial. Maka dibentuklah Program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta) yang dilaksanakan pada wilayah-wilayah yang tertinggal.

Hasil penelitian ini selaras dengan teori milik Ansell dan Gash dimana salah satu kondisi yang melatarbelakangi kerja sama antara pemangku kebijakan yakni

ketidakseimbangan antara kekuatan dan sumber daya manusia. Menyadari bahwa program ini membutuhkan kerjasama untuk mencapai target yang diharapkan maka Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi turut menggandeng beberapa pihak guna menyukseskan program ini.

Program ini diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dengan menggandeng pihak Kelurahan Mustikasari, dan Fasilitator. Fakta dilapangan menyebutkan bahwa program ini belum melibatkan pihak swasta dalam kerja samanya. Program ini juga belum melibatkan pihak univeritas sebagai salah satu mitra strategis.

Pada awalnya kondisi awal ini menemui beberapa kendala, seperti tidak ketidaksiapan masyarakat dimana mereka enggan untuk di data karena mereka mengira bahwa program ini sama dengan sekolah formal. Kendala selanjutnya yakni

keterbatasan waktu dari peserta ibu-ibu yang mengikuti program karena mereka memiliki kesibukan masing-masing entah menjadi Ibu Rumah Tangga atau pekerjaan lainnya. Tak hanya itu, tantangan lainnya yakni partisipasi maksimal dari semua peserta, terutama yang mengalami buta huruf. Serta, perbedaan tingkat daya tangkap masing-masing peserta terkait materi yang diberikan mengingat kualitas Sumber Daya Manusia yang beragam.

b. Desain Kelembagaan

Program Sekoper Cinta didukung oleh dasar hukum yang kuat dan jelas untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan temuan penelitian program ini berlandaskan pada regulasi yang tegas, yakni Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 260/KEP.36.A-DPPPA/I/2022 yang menunjuk Lokasi Kegiatan Sinergitas Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Kota Bekasi

Tahun anggaran 2022. Serta Peraturan Gubernur Jawa Barat terkait Sekolah Perempuan. Keputusan Wali Kota tersebut menyatakan bahwa Kelurahan Mustikasari ditunjuk sebagai lokasi Lokasi Kegiatan Sinergitas Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Kota Bekasi Tahun anggaran 2022, dimana program Sekoper Cinta ini merupakan salah satu program yang masih termasuk dalam Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS).

Keberadaan regulasi dan SK ini memastikan bahwa pelaksanaan program Sekoper Cinta memiliki landasan hukum yang jelas untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan perempuan yang lebih inklusif dan terarah. Di sisi lain, adanya dasar hukum yang jelas juga berfungsi sebagai alat pengawasan yang efektif. Dengan adanya regulasi dan SK, setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka

pelaksanaan program Sekoper Cinta dapat dipantau dan dievaluasi secara transparan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program tersebut tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa transparansi memainkan peran kunci dalam mendukung proses kolaboratif dalam program Sekoper Cinta. Proses monitoring dan pelaporan yang dilakukan secara rutin oleh berbagai pihak, seperti staf kelurahan, ibu-ibu PKK, dan dinas terkait menunjukkan adanya keterbukaan informasi yang terbentuk antar stakeholder. Kelurahan bertindak sebagai penerima laporan dan dokumentasi terkait dengan pelaksanaan program, sementara pihak dinas memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan. Fasilitator juga terlibat aktif dalam memastikan adanya transparansi

ini, dengan melaporkan perkembangan kegiatan yang mereka jalankan kepada Dinas.

c. Kepemimpinan

Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang dilakukan oleh Kepala Dinas selaku penyelenggara kebijakan dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pernyataan dari beberapa staf Dinas, Staf. Kepala Dinas berhasil menciptakan ruang bagi kolaborasi yang inklusif dengan mendukung semua pihak yang terlibat, baik dari aspek kebijakan, pembiayaan, hingga penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

. Ketersediaan fasilitasi tidak hanya mencakup kepemimpinan, tetapi juga mencakup dukungan sumber daya. Fasilitator tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga menjadi pendamping yang mendukung peserta dalam meningkatkan kapasitas mereka, baik secara teori maupun

praktik. Dari hal tersebut, kepemimpinan fasilitatif juga tercermin dalam cara fasilitator melaksanakan tugasnya.

Dukungan yang diberikan pihak Dinas adalah berupa sarana dan prasarana penunjang kebutuhan program seperti mesin jahit dan peralatan memasak. Bantuan ini diberikan kepada kelompok peserta untuk mendukung praktik keterampilan yang telah diajarkan. Langkah ini menunjukkan komitmen program dalam memfasilitasi peserta untuk memulai atau mengembangkan usaha mandiri, sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

d. Proses Kolaboratif

1. Dialog Tatap Muka

Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan rapat koordinasi dengan pihak kelurahan yang ditunjuk melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota yang dilakukan

untuk memastikan bahwa program ini memiliki dukungan administratif yang memadai. Koordinasi dengan Kelurahan Mustikasari diperlukan guna mencari dan pendataan peserta, menyusun rundown kegiatan, penentuan lokasi pembelajaran, dan monitoring hasil kegiatan.

Pada proses awal ini juga melibatkan rapat koordinasi untuk menunjuk 10 fasilitator yang bertindak sebagai tutor pengajar. Para fasilitator kemudian mengikuti pelatihan di tingkat Provinsi Jawa Barat untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan sebelum terjun ke masyarakat. Tak hanya melakukan komunikasi dengan pihak Kelurahan, pihak dinas juga melakukan komunikasi dengan pihak Fasilitator terkait waktu pelaksanaan dan monitoring pembelajaran.

Pihak Dinas juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat sebagai langkah awal dalam pengenalan program

Sekoper Cinta. Sosialisasi program ini juga didukung oleh pihak RT, RW, dan Kader. Penyuluhan ini merupakan merupakan langkah penting untuk menghilangkan miskomunikasi dan menciptakan pemahaman bersama.

2. Membangun Kepercayaan

Langkah membangun kepercayaan yang diterapkan dalam kolaborasi terkait pemberdayaan perempuan melalui program Sekoper Cinta dapat dilihat dari upaya pihak Dinas dalam memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai konsep sekolah informal. Hal ini dilakukan karena pada awalnya para peserta enggan untuk didata untuk mengikuti program ini, mereka beranggapan bahwa program ini sama seperti sekolah formal yang memberikan tugas atau ujian sehingga mereka takut tidak lulus. Berkat upaya dan dedikasi pihak Dinas dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang konsep dari program Sekoper Cinta mereka jadi bersedia bahkan

semangat untuk mengikuti kegiatan dari program ini.

Dalam membangun kepercayaan masyarakat, pendekatan yang digunakan adalah dengan memberikan rasa percaya diri dengan menekankan bahwa semua peserta mampu mengikuti kegiatan hingga lulus. Pihak Dinas dan Fasilitator berperan penting dalam menciptakan suasana mendukung, dengan memastikan bahwa penyampaian informasi dilakukan secara positif dan tidak menimbulkan rasa takut.

Upaya dalam membangun kepercayaan juga dilakukan dengan cara melakukan monitoring secara langsung (terjun ke lapangan) dan tidak langsung (menerima laporan dari lapangan) sebagai cerminan dari proses membangun kepercayaan karena menunjukkan keseriusan, komitmen, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan program. Pendekatan ini menciptakan rasa percaya yang lebih mendalam di antara para

stakeholder, memperkuat kolaborasi, dan memastikan program diimplementasikan secara baik.

3. Komitmen Pada Proses

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dari setiap stakeholder sudah saling memahami terkait komitmen dalam setiap proses kerja sama dalam pemberdayaan perempuan melalui program Sekoper Cinta. Hal ini dapat dibuktikan melalui tindakan nyata seperti pelaksanaan kegiatan dan pemantauan hasil kegiatan. Meskipun tidak ada komitmen formal dalam bentuk dokumen tertulis, para stakeholder menunjukkan komitmen mereka melalui partisipasi aktif dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

Komitmen pihak Dinas lebih bersifat tugas dan tanggung jawab profesional yang didorong oleh perintah pimpinan. Komitmen ini mencerminkan bentuk kepatuhan terhadap arahan organisasi atau instansi.

Komitmen dari pihak Fasilitator sendiri bisa dilihat dari memberikan waktu, tenaga, bahkan pikiran untuk membantu melaksanakan program ini. Untuk dari pihak masyarakat sendiri, bentuk komitmen ditunjukkan dengan mengikuti pembelajaran dengan cermat.

4. Kesamaan Pemahaman

Hasil penelitian ini kesamaan pemahaman diwujudkan dalam hal bahwa para stakeholder yang terlibat sudah saling memahami visi dan misi yang ingin dicapai. Mereka paham bahwa program Sekoper Cinta memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu-ibu peserta tentang pemahaman gender dan pemberdayaan ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan tujuan antara pihak pelaksana dan peserta dalam mendukung pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kapasitas pengetahuan dan ekonomi.

Program Sekoper Cinta juga sejalan dengan arahan dari tingkat provinsi, yaitu pemberdayaan perempuan di Kota Bekasi untuk menjadi mandiri dan meningkatkan perekonomian keluarga. Kesamaan visi dan misi ini menciptakan kerangka kerja yang jelas dan terarah bagi semua stakeholder dalam pelaksanaan program. Tak hanya sejalan dengan arahan dari tingkat provinsi, program Sekoper Cinta juga merupakan kepanjangan tangan langsung dari kebijakan tingkat provinsi. Hal tersebut menunjukkan adanya keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dan provinsi yang memberikan arah strategis dalam pelaksanaan program untuk mencapai tujuan pemberdayaan perempuan.

5. Hasil Sementara

Dalam penelitian ini, hasil sementara yang diperoleh dari proses kolaborasi antar stakeholder dalam program Sekoper Cinta di Kelurahan Mustikasari yakni para peserta program memiliki keterampilan dalam

berbisnis hingga dapat memulai usaha sendiri yang pada akhirnya membantu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Perubahan signifikan tersebut terwujud dalam peran wanita dalam masyarakat meningkat, dan membawa dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga.

Program Sekoper Cinta berhasil memberikan dampak positif bagi peserta yang sudah memiliki usaha. Melalui pelatihan yang diberikan, mereka semakin termotivasi untuk mengembangkan usaha mereka lebih lanjut. Peserta yang sudah memiliki usaha sendiri kini lebih percaya diri dalam mengelola bisnis dan mencari peluang pemasaran.

Program Sekoper Cinta memberikan dampak positif bagi peserta, terutama dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan kualitas hidup. Ibu-ibu yang sebelumnya hanya menghabiskan waktu di rumah kini mampu menghasilkan uang dan belajar menabung. Program Sekoper Cinta ini

berhasil meningkatkan motivasi dan semangat peserta dalam menjalani tugas-tugas rumah tangga. Melalui pelatihan dan pemberian pengetahuan, peserta merasa lebih percaya diri dan memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengelola rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kualitas kehidupan sehari-hari dan peran perempuan dalam keluarga.

Walau memberikan kontribusi yang positif bagi para peserta, sayangnya program ini tidak memiliki keberlanjutan. Meskipun peserta program Sekoper Cinta sudah memiliki *soft skills* dasar, seperti keterampilan menjahit dan pengetahuan tentang pemasaran, kekurangan yang ditemukan adalah kurangnya keberlanjutan dalam penerapan keterampilan tersebut. Setelah tahun anggaran berakhir, kegiatan ini cenderung berhenti tanpa adanya

dukungan lanjutan atau upaya memotivasi peserta agar terus berkembang.

Faktor Pendorong dan Penghambat Collaborative Governance

a. Man

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fasilitator program Sekoper Cinta mayoritas berasal dari individu yang memiliki pengalaman sebagai guru TK atau PAUD. Latar belakang ini menjadi keunggulan tersendiri karena mereka telah terbiasa mengelola kelas, menyampaikan materi dengan cara yang mudah dipahami, serta berinteraksi secara efektif dengan peserta. Kemampuan ini membantu mereka menjalankan peran sebagai fasilitator dengan baik, khususnya dalam mendampingi dan meningkatkan kapasitas para peserta yang terlibat dalam program.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa sebelum pelaksanaan program Sekoper Cinta, dilakukan pelatihan khusus bagi fasilitator yang terpilih. Para fasilitator

ini mengikuti pembinaan intensif yang diselenggarakan di Bandung. Selama pelatihan, mereka mempelajari secara mendalam modul-modul yang dirancang khusus untuk program ini. Pelatihan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitator memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai materi yang akan disampaikan serta mampu mendampingi peserta.

b. Machine

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam program Sekoper Cinta berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini didukung oleh keaktifan serta pemahaman yang mendalam dari semua stakeholder yang terlibat. Penggunaan teknologi menjadi salah satu faktor kunci yang mendukung kelancaran komunikasi dan pelaksanaan kegiatan, memungkinkan informasi dapat diakses dengan mudah dan dipahami oleh semua pihak. Kemajuan teknologi, seperti penggunaan aplikasi pesan instan, telah

menciptakan saluran komunikasi yang lebih efisien dan fleksibel. Grup WhatsApp, misalnya, digunakan untuk menyebarkan informasi, mengatur jadwal, mendiskusikan isu-isu terkait program. Hal ini tidak hanya mempermudah koordinasi antar stakeholder yang muncul selama pelaksanaan program. Teknologi ini memungkinkan para fasilitator dan peserta tetap terhubung meskipun terdapat keterbatasan waktu atau jarak.

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi antar stakeholder dalam program Sekoper Cinta berlangsung dengan baik dan tanpa hambatan. Komunikasi yang terbuka dan lancar memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa informasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dapat berlangsung dengan efektif, yang pada gilirannya mendukung kesuksesan kolaborasi tersebut.

c. Method

Setiap stakeholder memiliki peran dan tanggung jawab yang berkontribusi pada keberhasilan program. Pihak (DP3A) memiliki peran sentral sebagai pelaksana utama kegiatan program Sekoper Cinta. Sebagai pihak yang merancang dan menginisiasi program, DP3A bertanggung jawab atas perencanaan, penyediaan anggaran, serta kebijakan strategis yang menjadi dasar pelaksanaan. Peran ini menjadikan DP3A sebagai otoritas utama yang memastikan seluruh elemen program berjalan sesuai tujuan pemberdayaan perempuan yang telah ditetapkan. Selain itu DP3A juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang terlibat.

Kelurahan Mustikasari memiliki peran sebagai pemantau yang memastikan program dapat berjalan dengan baik di wilayahnya. Sebagai perwakilan pemerintah, kelurahan bertugas mendukung pelaksanaan teknis, memfasilitasi kebutuhan

administratif, serta menjadi mediator DP3A dan masyarakat.

Sementara itu, fasilitator memiliki peran sebagai pelaksana lapangan yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan kegiatan program. Mereka menjadi ujung tombak yang menjalankan berbagai aktivitas edukasi dan pemberdayaan di tengah masyarakat. Sebagai pihak yang terjun langsung ke lapangan, fasilitator bertugas menyampaikan materi, memberikan pelatihan, serta mendampingi peserta dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama program berlangsung.

Di sisi lain, masyarakat yang menjadi peserta program memiliki peran ganda sebagai objek sekaligus subjek dalam pelaksanaan program ini. Sebagai objek, mereka menjadi sasaran utama yang diberdayakan melalui berbagai kegiatan dan pelatihan. Namun, sebagai subjek masyarakat juga berperan aktif dalam

menentukan keberhasilan program melalui partisipasi, komitmen, dan kontribusi mereka selama kegiatan berlangsung.

d. Money

Pendanaan program Sekoper Cinta di Kota Bekasi lebih banyak bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi dibandingkan dengan alokasi dana dari tingkat provinsi. Salah satu alasan utama dari kebijakan ini adalah karena alokasi dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih kecil dibandingkan milik Pemerintah Kota Bekasi. Dengan mengandalkan APBD kota, program ini berjalan lebih optimal dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, sehingga memastikan pelaksanaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Keputusan untuk menggunakan APBD Kota Bekasi dalam pendanaan program ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberdayakan perempuan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendanaan dari pemerintah daerah juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam perencanaan dan pengelolaan program, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat lebih relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

e. Material

Pihak dinas telah menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung kelancaran program. Bantuan yang diberikan mencakup berbagai peralatan yang menunjang aktivitas ekonomi dan kemandirian peserta. Dengan adanya dukungan ini, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga kesempatan untuk menerapkan keterampilan dalam kegiatan yang dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi mereka. Selain itu, penyediaan fasilitas ini menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah dalam mendukung pemberdayaan perempuan secara konkret. Bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi

dirancang untuk menciptakan dampak jangka panjang dengan membantu peserta membangun usaha mandiri. Sehingga para peserta dapat lebih berdaya dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta) di Kelurahan Mustikasari telah berjalan dengan baik berkat adanya kolaborasi yang efektif antara berbagai stakeholder. Secara keseluruhan Indikator dalam collaborative governance sudah cukup baik. Walau keterlibatan sektor swasta dan lembaga pendidikan masih belum ada, padahal dapat menjadi elemen penting dalam memperluas cakupan dan keberlanjutan program.

Secara keseluruhan, program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta) di Kelurahan Mustikasari berhasil meningkatkan kapasitas

dan pemberdayaan perempuan. Namun program ini masih menghadapi tantangan dalam keberlanjutan dan efektivitas jangka panjang.

Rekomendasi

1. Dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kolaborasi program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta). Berikut merupakan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi:
 - a. Pemerintah harus menjalin kemitraan lebih erat dengan sektor swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pendanaan, sarana pendukung bagi peserta program, dan penguatan kapasitas

fasilitator melalui pelatihan yang lebih intensif.

- b. Pemerintah harus menjalin kemitraan lebih erta dengan lembaga pendidikan untuk berkontribusi dalam bentuk penelitian, pengabdian masyarakat, pemberian pelatihan, dan menyediakan akses ke bahan ajar/modul.
 - c. Perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan yang berbasis kebutuhan masyarakat, seperti pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, serta pemasaran digital agar para peserta dapat lebih mandiri secara ekonomi.
1. Dalam rangka untuk memaksimalkan faktor pendorong dan meminimalkan faktor penghambat *Collaborative Governance* dalam Sekolah

Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta). Berikut merupakan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi:

- a. Perlu diadakan pelatihan secara berkala terhadap fasilitator sesuai dengan perkembangan program serta melakukan mekanisme evaluasi kualitas terhadap fasilitator.
- b. Perlu adanya strategi berupa meningkatkan insentif dan kesejahteraan bagi fasilitator. Kedua, melakukan perekrutan dan pelatihan fasilitator baru secara berkala. Ketiga, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor yang

menyebabkan pengunduran diri fasilitator.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. (2011). *Teori, Konsep, dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Issue March).
- Andi Lestari, S. (2021). *Sa 'Id Madinatain. 2021*, 1–23.
- Ardiansyah, F. W., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2019). Analisis Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 15(2), 9–25.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/39942>
- Astuti, W. dan R. (2020). Sampul Collaborative Governance. *Collaborative Govenance Dalam Perspefkit Publik*, 161.
- Cahyani, N. P. T., Yudartha, I. P. D., & Lukman, J. P. (2024). Collaborative Governance dalam Menanggulangi Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Denpasar. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2), 72–84.
<https://doi.org/10.61292/eljbn.164>
- Dianti, Y. (2022). Collaborative Governance Pada Penerapan Perwali No 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Surabaya. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2(04), 5–24.
http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB_2.pdf
- Dr. Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd., Dr. Tuti Khairani Harahap., M. S., Syahril Hasibuan, ST., MT, Iesyah Rodliyah, S.Si., M. P., Sitti Zuhaerah Thalhah, S.Pd., M.Pd., Dr. Cecep Ucu Rakhman, S.Sos., M. ., Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, S.Pd., M.Hum., Dr. Inanna, S.Pd., M. P., Andi Aris Mattunruang S.E., M.Sc., Dr. Herman, S.Pd., M. P., Nursaeni, S.Ag., M.Pd., Dr. Yusriani, SKM., M.Kes, Dr. Nahriana, M. P., Dumaris E. Silalahi, S.Pd., M.Pd., Dra. Sitti Hajerah Hasyim, M. S., & Azwar Rahmat, M.TPd, Yetty Faridatul Ulfah, M.Hum, Nur Arisah, S.Pd., M. P. (2023). *Metode penelitian kualitatif*.
- Feblianto, D. A. E., Hariyoko Yusuf, & Basyar, M. R. (2024). Collaborative Governance Tentang Kampung Madani Sebagai UpayaPemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kota Surabaya (StudiPerbandingan Di Kelurahan Pradah Kalikendal Dan KelurahanJambangan). *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(4), 1–16.
- Handoko Dwi Susantyo. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Di Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Jurnal Adhikari*, 2(1), 226–234.
<https://doi.org/10.53968/ja.v2i1.56>
- Hayati, I. (2019). *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan*. 2(1), 57–67.
- Hendrawati, R. (2021). Berita Daerah Kota bekasi. *KeputusanPeraturan45 Tahun 2019*, 1–9.
<https://jdih.bekasikota.go.id/jdih/web/uploads/2021pw322357.B.pdf>
- Huda, N., Madya, F., & Priyanto, A. (2023). Analisis Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Samsat Wilayah

- Kabupaten Natuna. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(1), 180–187. <https://doi.org/10.58258/jime.v9i1.4382>
- Iyoega, R. R., Trilestari, E. W., & Kirana, C. A. D. (2020). Collaborative Governance dalam Pembangunan Sektor Pertanian di Kabupaten Bandung. *Perspektif*, 9(1), 55–65. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i1.2864>
- Kinanggi, A. R. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Edelweis Wonokitri Kabupaten Pasuruan. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 3(11). <https://ejournal.warunayama.org/index.php/musytarineraca/article/view/2124%0Ahttps://ejournal.warunayama.org/index.php/musytarineraca/article/download/2124/1984>
- Kiswoyo, G. P., Nurcahyanto, H., & Marom, A. (2023). Proses Collaborative Governance Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2), 60–73. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/37955>
- Latipah, I. (2020). Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemanfaatan Media Youtube Dalam Meningkatkan Keterampilan Wirausaha. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 3(2), 83. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v3i2.4150>
- Madya Putra Yaumil Ahad, & Nugraha Barsei, A. (2023). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Best Practice dari Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(01), 52–74. <https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.236>
- Maharashtri, S., Marom, A., & Herbasuki, H. (2023). Proses Collaborative Governance Dalam Layanan Aspirasi Dan Penanganan Aduan Kanal Sapa Mbak Ita Di Kota Semarang. *Jurnal Tinjauan Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 12(2)(July), 1–23.
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Jurnal Publiciana*, 11(1), 72–88.
- Medho, Y. F. (2023). Collaborative Governance Antara Bengkel APPEK Dengan Pemerintah Desa Lifuleo Dalam Pengembangan Wisata Pantai Oesina. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3, 5705–5721. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2508%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/2508/1970>
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praijjing Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 140–148. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790>
- Ni Made Angeliana Suwantara Putri, Putu Eka Purnamaningsih, & Ni Wayan Supriyanti. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Pinge Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. *Business and Investment Review*, 2(1), 47–57. <https://doi.org/10.61292/birev.92>
- Noer, K. U. (2021). Empowerment of women as head of poor family through

- the P2WKSS program in Bekasi City. *Community Empowerment*, 6(5), 864–876. <https://doi.org/10.31603/ce.4553>
- Nurul Hidayah, T., Sulaiman, A., Urruba Altriara, D., Nur Latipah, L., Qomariyah Fathekul Zanah, N., & Herayani, S. (2024). Penerapan collaborative Governance Pada Orang Tua Tentang Stunting di Posyandu Puskesmas Sawah Baru Ciputat Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2(12), 1234–1240. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i12.2321>
- Pamungkas, O. D., & Priyo Sudibyo, D. (2021). Collaborative Governance Dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Surakarta Collaborative Governance in the Repair Program for Unvivable Houses in the City of Surakarta. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 1(1), 1–17.
- Pasca, M., Covid, P., Dinas, D. I., Dan, K., & Diy, U. K. M. (2024). *Journal of public policy and administration research*. 02.
- Pebriani, H., & Nasyaya, A. (2023). Collaborative Governance dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(2), 137–148. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i2.2905>
- Priono, S., & Rusli, Z. (2023). Pengembangan Wisata Kampung Bandar Berbasis Collaborative Governance oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. *Jurnal Penelitian Tambusai*, 7(2), 16011–16017.
- Rahayu, W. K. (2022). Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Perempuan Terhadap Keluarga Terdampak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. *Dinamika Governance :Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 119–130. <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/1198>
- Septiana, A. D., Suprastiyo, A., & Swasanti, I. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kabupaten Bojonegoro. *JIAN-Jurnal Ilmu ...*, 5(1), 8–15. <http://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JIAN/article/view/384>
- Septiani, E., Muhammadiyah, M., & Mappamiring, M. (2021). Faktor Pendukung Dan Penghambat Proses Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Luwu Utara. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 3(1), 01–06. <https://doi.org/10.26618/jppm.v3i1.4900>
- Silviani, R., & Eriyanti, F. (2023). Faktor Pendukung dan Penghambat Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Program Air Bersih di Nagari Tluk Amplu Inderapura. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(2), 176–185. <https://doi.org/10.47134/villages.v4i2.54>
- Syaadah, R., Ary, M. H. A. A., Silitonga, N., & Rangkuty, S. F. (2023). Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan Informal. *Pema (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(2), 125–131. <https://doi.org/10.56832/pema.v2i2.298>

- Tielung, F., Nurdin, N., & Sri, N. (2023). Collaborative Governance Penanganan Bagi Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Melalui Rumah Aman Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2). <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2.3780>
- ZAMRONI, Z. (2022). Kolaboratif Governance Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Wilayah Kabupaten Lingga. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3), 9739–9749. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3221>
- Wahyu Hidayat. (2022). Collaborative governance dalam pengembangan digitalisasi umkm pada era revolusi industri 4.0 di wilayah bangka belitung. *TheJournalish: Social and Government*, 3(3), 247–254. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/tejournalish/index>
- Wahyuni, feni rita fiantika and sri. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasini* (Issue Maret). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAAJ&hl=en>
- Wanti Anggrain, N., & Mashur, D. (2022). Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). *Journal of Social and Policy Issues*, 1, 34–38. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i1.31>
- Yahya, H., & Sudarmo, S. (2022). Collaborative Governance dalam Program “EPPSON” sebagai Perwujudan Smart City di Kota Surakarta. *Wacana Publik*, 2(1), 239. <https://doi.org/10.20961/wp.v2i1.63278>
- Zakia, E. L., & Wicaksono, I. (2023). Collaborative Governance dalam Mewujudkan Desa Devisa di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *TRILOGI: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Eksakta*, 3, 1–11.